

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis SiLPA sebagai Indikator Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2024, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kupang selama Tahun Anggaran 2020–2024 menunjukkan adanya dinamika pada realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, kondisi surplus atau defisit, dan pembiayaan netto. Berdasarkan analisis deskriptif dan analisis deskriptif komparatif, realisasi pendapatan dan belanja daerah secara umum mengalami peningkatan pada akhir periode penelitian, sedangkan realisasi pembiayaan netto mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perubahan realisasi pendapatan dan belanja menghasilkan kondisi surplus atau defisit yang berbeda pada setiap tahun, yang selanjutnya berkaitan dengan pembentukan SiLPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan realisasi pendapatan daerah tidak secara otomatis diikuti peningkatan SiLPA, karena nilai SiLPA juga dipengaruhi oleh realisasi belanja daerah, kondisi surplus atau defisit, serta pembiayaan netto pada masing-masing tahun anggaran.
2. Berdasarkan analisis perkembangan dan analisis tren, SiLPA Pemerintah Kabupaten Kupang selama Tahun Anggaran 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Nilai SiLPA tertinggi terjadi pada tahun 2020

sebesar Rp111.326.776.656,35. Pada tahun 2021, SiLPA menurun sebesar Rp32.901.032.204,69 atau 29,55% menjadi Rp78.425.744.451,66. Selanjutnya, pada tahun 2022 SiLPA kembali menurun sebesar Rp64.400.003.986,74 atau 82,11% menjadi Rp14.025.740.464,92 dan merupakan nilai terendah selama periode penelitian. Pada tahun 2023, SiLPA meningkat sebesar Rp54.708.516.319,38 atau 390,07% menjadi Rp68.734.256.784,30. Kemudian, pada tahun 2024 SiLPA kembali menurun sebesar Rp6.479.001.475,14 atau 9,43% menjadi Rp62.255.255.309,16. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan nilai SiLPA dari tahun ke tahun berkaitan dengan perubahan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, kondisi surplus atau defisit, dan pembiayaan netto dalam pelaksanaan APBD.

3. Berdasarkan analisis rasio, rasio SiLPA terhadap realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kupang selama Tahun Anggaran 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Rasio SiLPA terhadap belanja daerah sebesar 9,68% pada tahun 2020, menurun menjadi 6,61% pada tahun 2021 dan mencapai rasio terendah sebesar 1,14% pada tahun 2022. Selanjutnya, rasio meningkat menjadi 5,56% pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 4,46% pada tahun 2024. Hasil tersebut menunjukkan perubahan proporsi SiLPA terhadap realisasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran. Rasio tersebut digunakan sebagai alat analisis deskriptif untuk menggambarkan proporsi SiLPA terhadap realisasi belanja daerah dan tidak dimaksudkan untuk menentukan baik atau

buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah karena penelitian ini tidak menggunakan standar baku yang secara khusus menetapkan kategori penilaian rasio SiLPA terhadap belanja daerah.

5.2. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai bagian dari hasil pelaksanaan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah relevan untuk menjelaskan hasil penelitian mengenai pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kupang selama Tahun Anggaran 2020–2024. Perubahan nilai SiLPA dari tahun ke tahun dapat dilihat melalui perubahan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, kondisi surplus atau defisit, dan pembiayaan netto yang tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan SiLPA tidak hanya dilihat dari perubahan nominal SiLPA, tetapi perlu dipahami dengan memperhatikan perubahan komponen APBD yang berkaitan dengan pembentukan SiLPA pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut terlihat dari adanya perubahan nilai SiLPA selama periode penelitian yang berjalan seiring dengan perubahan realisasi pendapatan, belanja, kondisi surplus atau defisit, dan pembiayaan netto.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan penguatan terhadap pemahaman bahwa analisis deskriptif kuantitatif, analisis deskriptif komparatif, analisis tren, dan analisis rasio SiLPA terhadap belanja daerah dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan dan dinamika pelaksanaan APBD berdasarkan data realisasi keuangan daerah. Dalam konteks penelitian ini, rasio SiLPA terhadap belanja daerah memberikan gambaran mengenai proporsi SiLPA terhadap realisasi belanja daerah, bukan sebagai ukuran untuk menentukan baik atau buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah karena penelitian ini tidak menggunakan standar baku kategorisasi rasio tersebut.

Dengan demikian, implikasi teoritis penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman bahwa SiLPA sebagai hasil akhir pelaksanaan APBD perlu dianalisis dengan melihat keterkaitannya dengan komponen-komponen APBD yang membentuknya, sehingga perubahan SiLPA dari tahun ke tahun dapat dipahami secara lebih komprehensif.

5.3. Implikasi Terapan

Hasil penelitian ini memberikan implikasi terapan bagi Pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya dalam evaluasi pelaksanaan APBD. Informasi mengenai perkembangan SiLPA dan rasio SiLPA terhadap realisasi belanja daerah dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk memahami perubahan hasil pelaksanaan APBD dari tahun ke tahun. Perubahan nilai SiLPA dapat menjadi informasi pendukung dalam menelaah

keterkaitan antara realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, kondisi surplus atau defisit, dan pembiayaan netto dalam pelaksanaan APBD.

Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, terutama dalam menyesuaikan perencanaan pendapatan dengan kapasitas penerimaan daerah, pengalokasian dan pelaksanaan belanja sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta pengelolaan pembiayaan daerah. Dengan demikian, informasi mengenai perubahan SiLPA dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBD pada tahun anggaran berikutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian mengenai SiLPA dan pelaksanaan APBD dengan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang, objek penelitian yang berbeda, maupun teknik analisis yang lebih beragam. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan kajian dengan memasukkan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan pembentukan SiLPA sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pengelolaan keuangan daerah.